

DPRD Dorong Pemkab Bogor Beri Insentif di Sektor Peternakan

CIBINONG (IM)- DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendorong pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memberikan insentif untuk para peternak agar bisnisnya bisa selamat meski di tengah kondisi pandemi Covid-19.

"Harusnya ada insentif-insentif, contohnya insentif pemberian pakan, dari hibah-hibah pemerintah Kabupaten Bogor," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.

Strategi pemulihan ekonomi imbas pandemi yang dilakukan Pemkab juga seharusnya menasar para peternak, yang kondisinya memprihatinkan. "Kabupaten Bogor seperti Ciseeng, merupakan wilayah sentra perikanan. Pada saat pandemi Covid-19 pemasaran mereka berkurang, ekspor juga berkurang jauh," kata politisi Partai Gerindra itu.

Jika bercermin dari Lapo-

ran Pertanggungjawaban (LP) tahun 2020 Bupati Bogor, stimulus yang diberikan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan untuk para peternak hingga kini masih minim.

Untuk itu, Rudy meminta kepada Dinas Perikanan dan Peternakan agar bersiap memberikan sejumlah insentif kepada para peternak di tahun 2022 agar kondisi perekonomian terselamatkan. "Dinas Perikanan dan Peternakan, supaya bersiap di tahun 2022. Hari ini semestinya banyak pemberian hibah-hibah, hewan ternak, pakan ternak, bibit-bibit pertanian. Sebelum hancur harus ada pendampingan," kata Rudy.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada penurunan dari jumlah produksi perikanan di wilayah Kabupaten Bogor. Jenis ikan konsumsi dari 122.228 ton pada tahun 2019 anjlok menjadi 118.771 ton pada tahun 2020. ● **gio**

64 Persen Penduduk Jabar Mendapat Bantuan Sosial Selama PPKM

BANDUNG (IM)- Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil mengatakan bahwa sekitar 64 persen dari seluruh penduduk Provinsi Jawa Barat yang jumlahnya hampir 50 juta mendapat bantuan sosial dari pemerintah selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penularan Covid-19.

"64 persen warga Jabar di-cover oleh bantuan sosial formal. Yang dulunya (cakupan bantuan) dari pemerintah pusat hanya 40-an persen, sekarang sudah 60-an persen," katanya saat menyampaikan keterangan pers secara virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (22/7).

Ia mengatakan, pemerintah daerah akan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak PPKM yang belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat. "Provinsi akan menyalurkan mereka-mereka yang terdampak PPKM tapi tidak terdapat di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau di data formal," katanya. "Saya minta juga kepada rekan-rekan wartawan kalau menemukan ada kelompok masyarakat yang tidak terdaftar bansos formal, itu bisa kita bantu dari provinsi," ia menambahkan.

Gubernur ikut menyalurkan bantuan sembako dan tunai kepada warga yang terdampak PPKM pada Selasa (20/7) dan Rabu (21/7). Dia mengajak komunitas membantu menyalurkan bantuan kepada warga terdampak PPKM yang belum masuk ke dalam data pemerintah.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar menyampaikan bahwa selama PPKM berlangsung pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyalurkan bantuan sosial melalui 13 pintu kepada warga

Jawa Barat. Pemerintah antara lain menyalurkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) reguler, program bantuan pangan non-tunai (BPNT) atau program bantuan sembako reguler, dan program bantuan sosial tunai (BST).

Pemerintah juga memberikan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat PKH dan keluarga penerima manfaat BST. Selain itu ada program pemberian tambahan bantuan beras dari pemerintah kabupaten/kota dan penyaluran bantuan beras masing-masing lima kg per keluarga yang dilakukan menggunakan dana non-APBN dari Kantor Sekretariat Presiden.

Selanjutnya, ada penyaluran bantuan langsung tunai menggunakan Dana Desa, bantuan untuk pelaku usaha mikro, bantuan berupa diskon biaya listrik, bantuan dalam program Kartu Prakerja, dan bantuan kuota akses Internet.

Di samping itu, ada pemberian bantuan sosial dari pemerintah kabupaten dan kota di Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Bogor.

Dodo mengatakan bahwa jumlah penerima ke-13 jenis bantuan dari pemerintah tersebut di wilayah Jawa Barat tercatat 10.129.949 keluarga penerima manfaat (KPM) dan 4.362.641 orang.

Ia menambahkan, jumlah penerima manfaat PKH dan BST di Jawa Barat bertambah dari 1.718.362 menjadi 1.813.956 keluarga dan penerima BST bertambah dari 1.957.321 menjadi 2.060.882 keluarga. "Penambahan ini kemungkinan dari hasil usulan Penda Provinsi maupun Penda Kabupaten/Kota yang sudah masuk ke buffer stock data Kemensos sudah ber-NIK valid dan padan dengan Kependagri," kata Dodo. ● **pur**



IDN/ANTARA

PPKM DI MEDAN DIPERPANJANG

Warga melintas di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kesawan, Medan, Sumatera Utara, Kamis (22/7). Pemerintah Kota Medan resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli 2021.

Kab. Bogor Masih 'Darurat Oksigen'

CIBINONG (IM)- Pemprov Jawa Barat belum menambahkan bantuan pinjaman tabung oksigen untuk Kabupaten Bogor. Dari kebutuhan 400 buah tabung, mereka baru bisa meminjamkan 135 buah tabung oksigen. Hal itu karena sedikit atau jarang pabrikan pembuatan tabung oksigen, terutama yang berukuran 6 dan 10 kubik.

"Pemprov Jawa Barat juga kesulitan dalam upaya membeli tabung oksigen karena banyak permintaan sementara pabrik pembuatan tabungnya sedikit, hingga dari permohonan kebutuhan, mereka baru bisa meminjamkan 135 buah tabung oksigen untuk Kabupaten Bogor," ucap Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Burhanudin, kemarin.

Walapun begitu, Burhan sapaan akrabnya mengucapkan atas nama Bupati Bogor, Ade Yasin ia menyatakan banyak terima kasih kepada Gubernur Ridwan Kamil maupun Pemprov Jawa Barat. "Dalam 2 minggu ini, Kabupaten Bogor mendapatkan pinjaman 135 buah tabung oksigen. Jumlah

ini termasuk yang paling banyak dibanding daerah lainnya karena memang kebutuhan kita yang lebih banyak," ucapnya.

Alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatininggar ini menuturkan untuk menutupi kekurangan tabung oksigen, melalui anggaran biaya tak terduga (BTI), Pemkab Bogor akan membeli 200 buah tabung oksigen.

"Biaya pembelian 200 tabung oksigen ini diambil dari biaya BTI, namun hal itu tidak mudah karena prosesnya harus inden karena banyaknya kebutuhan, sementara pabriknya jarang," tutur Burhan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Yani Hassan menjelaskan untuk bantuan oksigen, PT Krakatau Steel sangat membantu kebutuhan masyarakat Bumi Tegar Beniman.

"Kami ucapkan banyak terima kasih kepada PT Krakatau Steel karena layanannya selalu luwes, sampai sejauh ini mereka sangat membantu kebutuhan oksigen 4 RSUD dan 25 rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Bogor," jelas Yani. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

DISTRIBUSI OBAT PAGI PASIEN ISOMAN DI BANDUNG

Sejumlah kader Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) berjalan menuju rumah warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di Antapani Kidul, Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/7). Puskesmas di Kota Bandung memiliki layanan pemberian obat COVID-19 oleh kader SBM guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya.

PPKM Diperpanjang, Beban Hotel dan Restoran di Bogor Makin Berat

Selama masa berlaku PPKM level 4, hanya ada 8% hingga 9% kunjungan tamu atau okupansi hotel. Lalu restoran juga terpuruk, terjadi penurunan omzet 70% hingga 75% dengan larangan makan ditempat dan hanya diperbolehkan take away. Akibat keadaan itu, hotel dan restoran melakukan efisiensi di berbagai pembiayaan. Mereka juga harus merumahkan kembali karyawan tanpa dibayar.

BOGOR (IM)- Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor mengaku

kecewa dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Ini 17 Titik Putar Balik Ganjil Genap Kota Bogor, Berlaku Mulai Jumat

BOGOR (IM)- Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Candro menyebut, ada 17 titik check point atau putar balik yang bakal didirikan selama penerapan program ganjil genap selama 24 jam yang mulai berlaku Jumat (23/7) hingga Minggu (25/7).

Check point didirikan untuk menghalau dan mengecek kendaraan yang masuk ke Kota Bogor berdasarkan tanggal disesuaikan dengan angka terakhir pelat nomor kendaraan, yakni ganjil atau genap.

"Ganjil genap berlaku 24 jam," kata Susatyo. Adapun ke 17 titik check point yang bakal didirikan yakni:

1. Simpang Jembatan Merah
2. Simpang Empang (satu arah dari BTM)
3. Simpang Baranangisang
4. Simpang McD Lodaya
5. Simpang Pos Terpadu Juanda
6. Simpang Denpom
7. Simpang Warung Jambu
8. Simpang SPBU Vivo Air Mancur
9. Putaran eks Balai Binarum
10. Underpass Soleh Iskandar
11. Simpang Tol BORR
12. Putaran SPBU Veteran
13. Simpang Salabenda
14. Simpang Ciawi

15. Simpang Dramaga
16. Simpang Yasmin
17. Simpang Brimob Kedung Halang

Kapolresta juga menyebut, ada pengecualian bagi beberapa kendaraan untuk dapat melintas meski pelat nomor yang digunakan tidak sesuai dengan tanggal pelaksanaan penerapan kebijakan ganjil genap.

"Tentunya ada pengecualian bagi beberapa kendaraan. Di antaranya para nakes, Damkar, ambulance/mobil jenazah, kendaraan dinas TNI Polri, angkutan umum, angkutan online, angkutan logistik/sembako serta kondisi darurat lainnya. Kami berharap ini bisa diketahui masyarakat secara luas," ucapnya.

Disinggung apakah warga luar Kota Bogor diizinkan melintas jika pelat nomornya sesuai dengan tanggal penerapan ganjil genap, Kapolresta menuturkan, petugas nanti akan melihat apakah yang bersangkutan masuk ke Kota Bogor dengan alasan darurat atau tidak.

"Nanti kita lihat alasannya darurat atau tidak. Kalau naik angkot masih bisa, kan angkutan umum juga masih dibuka," ucapnya.

Hal itu menambah beban operasional hotel-hotel dan restoran di Kota Bogor.

Ketua PHRI Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay mengatakan, Kota Bogor mempunyai 71 hotel dan belasan restoran yang bergantung pada kunjungan wisatawan pada akhir pekan atau tamu MICE setiap harinya. Ia mengaku kecewa dengan perpanjangan PPKM Level 4 hingga 5 hari ke depan.

Selama masa berlaku PPKM level 4, Yuno menyebut hanya ada 8% hingga 9% kunjungan tamu atau okupansi hotel. Lalu restoran juga terpuruk, terjadi penurunan omzet 70% hingga 75% dengan larangan makan ditempat dan hanya diperbolehkan take away.

"Jadi kita berharap adanya koreksi keputusan ini sesegera mungkin," paparnya, Kamis (22/7).

Akibat keadaan itu, hotel dan restoran melakukan efisiensi di berbagai pembiayaan. Mereka juga harus merumahkan kembali karyawan tanpa dibayar.

"Jadi kita girir absennya lalu kita konversi gajinya jadi harian. Kita bayar pada saat mereka masuk. Ini yang membuat kami juga berharap segera bisa dibuka kembali pembatasan pembatasan kegiatan usaha kami ini supaya juga menolong karyawan di sektor kami," jelas Yuno.

Di sisi lain, PHRI Kota Bogor juga meminta penundaan pembayaran pajak per tiga bulan

ke depan. Yuno menyebut, pembayaran pajak pada saat pandemi akan menjadi beban besar, tetapi sangat menolok bila diberikan kelonggaran tanpa denda.

"Jadi kita tidak minta penghapusan pajak tapi kita minta penundaan pembayarannya tanpa denda itu yang kita minta," katanya.

Juga kebijakan-kebijakan yang bersifat biaya di tingkat pusat yaitu tentang listrik PLN, dan juga BPJS baik kesehatan maupun tenaga kerja karyawan. "Belum beban-beban lainnya seperti kebijakan relaksasi pinjaman dari perbankan dan sebagainya, dan itu harus diputuskan di tingkat pusat tapi sampai saat ini belum ada jawaban," tandas Yuno. ● **gio**

Keganasan Covid Telah Merenggut Tokoh Humoris Itu



SONY ABDUSSUKUR KURNIA ABDUL KARIM

CIBINONG (IM)- Kabar duka datang dari DPRD Kabupaten Bogor. Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor, Sony Abdussukur Kurnia Abdul Karim meninggal dunia Kamis dini hari pukul 01.45 di Ruang Intensive Care Unit (ICU) RSUD Cibinong.

Pejabat yang sangat humoris tersebut menghembuskan nafas terakhirnya setelah lebih satu dari satu minggu berjuang melawan virus korona (Covid-19).

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan keluarga besar DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor merasakan duka yang mendalam.

Menurut ayah tiga orang anak ini, sosok Sony merupakan figur yang banyak membantu dalam menjalankan aktifitas di Gedung DPRD Kabupaten Bogor.

"Beliau sosok pekerja yang baik, hangat dan mudah bergaul dengan anggota dewan, staf maupun wartawan yang tergabung dalam Pokja DPRD Kabupaten Bogor," kata Rudy, usai menyalatkan dan melepas jenazah dari RSUD Cibinong, sebagai bentuk penghormatan terakhir, Kamis (22/7).

Politisi Partai Gerindra ini mendoakan, agar almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT dan juga mendoakan keluarga yang

ditinggalkan diberi kesabaran.

"Terimakasih atas pengabdianmu, terima kasih atas dedikasmu dan terimakasih atas kesetiannya mengabdikan kepada bangsa dan negara melalui Pemerintah Kabupaten Bogor," ungkapnya.

Pak Sonny, demikian sapaan akrabnya, sebelumnya sempat jatuh pingsan karena penyakit lambung di rumahnya, di Taman Pagelaran Rt 04/12, Ciomas, Kabupaten Bogor.

Sony Abdussukur dirawat di ICU RSUD Cibinong, sejak Rabu, (14/7) yang lalu. Sebelum bertugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, ia sempat menjabat Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu, dan sempat lama jadi Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bogor.

Jenazah Sonny disalatkan di Ruang Pemulasaraan Jenazah dan halaman RSUD Cibinong, sekira pukul 07.10. Selain Ketua DPRD, Rudy Susmanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim juga hadir mengimami salat jenazah dan mendoakan almarhum.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin juga ikut melepas jenazah menuju lokasi pemakaman keluarga di TPU Sukamakmur. Sony dimakamkan dengan protokol kesehatan Covid-19. ● **gio**



IDN/ANTARA

PELAYANAN VAKSIN COVID-19 DI PUSKESMAS

Warga berkonsultasi dengan tenaga kesehatan usai menjalani vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Jajaway, Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/7). Sebanyak 80 Puskesmas di Kota Bandung memberikan layanan vaksinasi bagi warga setempat sebagai salah satu langkah percepatan program vaksinasi nasional.